

# KEMBALI KE PEDESAAN DAN PERTANIAN: Landasan Rekonstruksi Perekonomian Nasional<sup>1</sup>



Mochammad Maksu  
Guru Besar FTP UGM Yogyakarta dan  
Wakil Ketua PWNU DIY Yogyakarta

Nyaris tidak lagi terdengar ungkapan *gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja*.<sup>2</sup> Kiasan sang Pujangga yang dulu acap terdengar dalam *antawacana ringgit purwa* di Balai Desa, telah mempengaruhi pikiran seorang anak desa yang hidup dari langgar ke langgar, jauh dari ingar-bingar kota. Pengaruh tersebut diperkuat sumpah

serapah kaum ibu ketika jengkel terhadap putri nakalnya sembari *sepata*: “*tak dongakke mbesuk gedhe entuk bojo pegawai kowe ndhuuk..*”.

Tersirat hebatnya potensi pedesaan dan pertanian tempo *doeloe*, ketika Nusantara masih meyakini diri sebagai Negara Agraris. Keyakinan itulah landasan prioritas yang tersurat dalam langkah keagrariaan sejak proklamasi 1945, dan ditopang berbagai lembaga teknis pembangunan pedesaan dan pertanian yang dipandang sebagai soal hidup atau mati.<sup>3</sup> Semangat prioritas ini secara substantif-revolusioner mulai dirancang melalui dibentuknya Panitia Agraria Jogjakarta, 1948.

Semangat agraris tersebut tak pernah luntur. Misi Panitia Jogja berurutan dilanjutkan Panitia Agraria Djakarta, 1951, dan Panitia Soewahjo, 1955, disusul lahirnya Rancangan Soenarjo, 1958, Rancangan Soedjarwo, 1960, dan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UU-5/1960) yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 104, 24 Septem-

<sup>1</sup> Tulisan ini bermula dari ceramah guru besar yang disampaikan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2008 di UGM Yogyakarta

<sup>2</sup> Anonim, *Babad Tanah Djawi*, (M.Nijhoff: Gravenhage, 1941).

<sup>3</sup> Soekarno, “Soal Hidup Atau Mati,” Pidato Peletakan Batu Pertama Fakultas Pertanian, Bogor, (Bogor: PSP3-IPB, 2005),

<sup>4</sup> Harsono, *UUPA: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djembatan, 1968)

ber 1960.<sup>4</sup> Kedaulatan ekonomi jutaan investor gurem adalah esensi utama UUPA, yang ditegaskan dalam konsideran Kepres RI No. 169/1963 tentang Penetapan 24 September sebagai Hari Tani:

Bahwa tanggal 24 September, hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hari kemenangan bagi Rakyat Tani Indonesia, dengan diletakkannya dasar-dasar bagi penjelenggaraan *land reform* untuk mengikis habis sisa-sisa imperialisme dalam lapangan pertanian, agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari segala matjam bentuk penghisapan manusia atas manusia dengan beralat tanah, sehingga melempangkan djalan menudju ke arah masyarakat adil dan makmur.

Dibentuknya Kementerian Pembangunan Masyarakat, dipimpin Soegondo, 1950, merupakan pendekatan sosial yang dipilih, menyertai upaya teknis. Pelembagaan pembangunan masyarakat desa mewarnai pula tata lembaga seluruh konfigurasi politik nasional.<sup>5</sup> Yang menarik adalah temuan Haryati bahwa semua itu gagal membangun kemandirian dan ketahanan rakyat. Kalau pada masa awal usia bangsa, kegagalan itu karena persoalan politik sebagai negara baru, pada masa terakhir justru karena pembangunan menempatkan rakyat sebagai instrumen, alat pembenar dan legitimasi belaka.

Menempatkan mereka sebagai obyek pun negara, tepatnya Pemerintah, telah gagal, apalagi sebagai subyek pembangunan.<sup>6</sup>

Instrumentalisasi rakyat mengingkari dua asas dari Panca Program UUPA, yaitu penghentian penghisapan feodal terhadap rakyat dan perencanaan tata-agraria. Dua asas yang belakangan disebut *access reform* adalah pasangan *land reform* dalam UUPA, dan berkenaan dengan reforma akses yang memungkinkan rakyat memanfaatkan lahan lebih baik sebagai alat ekonomi, termasuk akses partisipasi, modal, teknologi, pasar, informasi, dsb.<sup>7</sup> Ironisnya, akses yang seharusnya dibuka luas bagi pedesaan, pertanian dan agro-industri negara agraris ini justru dibantu dalam gegap-gempita industrialisasi.

Pedesaan dan pertanian, kendati sangat berbeda, memiliki kepaduan sektoral yang nyaris tak terpisahkan. *Kembali ke Desa* (KkD) dan pengawinan kata pedesaan dan pertanian dalam pidato ini dimaknai sebagai 'pertanian pedesaan', pertaniannya rakyat tani sebagai jutaan investor gurem dan subyek dengan segala kedaulatannya. Segmentasi ini dibuat karena instrumentalisasi telah memupuk subur ketergantungan dan ketidakberdayaan petani, pembahasaan lain ungkapan Haryati: kegagalan pengembangan

<sup>5</sup> F. Haryati, *Konfigurasi Politik, Pembangunan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Kemiskinan*, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, 2003.

<sup>6</sup> Maksam, 'Pembelaan Negara Terhadap Petani: Utopia atau Dagelan Ekonomi Politik Sepanjang Masa?' Dialog Terbuka DPP-HA IPB. Bogor, 10 Desember 2005.

<sup>7</sup> J. Winoto, *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, (Yogyakarta: UGM, 2007)

kemandirian dan ketahanan rakyat pedesaan, sebagai beban historis monumental pembangunan pertanian.<sup>8</sup>

### Beban Historis

Dalam prosesi kepemimpinan nasional, pemerintahan masa reformasi tidak terlepas dari persoalan pembangunan rezim sebelumnya yang mengikat sebagai kendala. Sedikitnya ada tiga kendala ekonomi-politis merupakan beban sejarah struktural yang membatasi kinerja dan akselerasi pembangunan pertanian sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa.<sup>9</sup>

Pertama, kegagalan adopsi model pembangunan dalam pengembangan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Tanpa menafikan capaian positif yang ada, pengembangan pedesaan dalam semua konfigurasi politik menanamkan ketergantungan dan ketidakberdayaan publik sebagaimana disebutkan. Kegagalan adopsi nilai asasi *participation-creativity-stimulation* dalam pemberdayaan, ada-

lah pelajaran mendasar yang seharusnya telah dibenahi lebih awal dalam masa pemerintahan pasca Orde Baru.

Berpuluh tahun, pembangunan dilakukan sentralistik dan otoriter dengan negara sebagai pusat kekuatan ekonomi<sup>10</sup>. Reformasi menuju desentralisasi dan otonomi daerah ditandai oleh maraknya gagap kolektif pada semua level dan diwarnai *euphoria* politik, politik lokal dan politik aliran, serta partisipasi publik *plintiran*. Ini semua adalah beban historis kedua anak bangsa yang hampir sepuluh tahun reformasi, tetapi tanpa realisasi, karena tidak pernah bertemunya gerakan



hinamagazine.com

<sup>8</sup>Haryati, *Konfigurasi Politik, Pembangunan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Kemiskinan*, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, 2003.

<sup>9</sup>Maksum, *Mengkritisi Berbagai Kendala Struktural Sektor Pertanian*, Pembahasan Presentasi Mentan: Pembangunan Pertanian 2000-2003 sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian. UGM, 22 Juni 2004.

<sup>10</sup>Mokhtar Mas'od, et. all, *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta: PSPK-UGM, 2000); Lihat juga K.H. Jung et. all, *Civil Society Response to Asian Crisis-Thailand, Indonesia and Korea*, (Korea: IEWS, Yonsei University, 2003).

politik dan pembangunan perekonomian,<sup>11</sup> serta makin *gentayangan*-nya hantu-hantu demokrasi.<sup>12</sup>

Beban ketiga adalah krisis ekonomi yang terjadi akibat *kebablasan* mengimani *the Asian Development Model* dengan negara sebagai kekuatan sentral industrialisasi dan menempatkan pertanian termarginalisasi. Agro-industri yang sebetulnya mudah berkembang keunggulan kompetitifnya karena telah dimilikinya keunggulan komparatif dan seharusnya dipilih dalam industrialisasi, justru tidak dikembangkan dan malah dikorbankan untuk industri non-pertanian. Rehabilitasi sektor pertanian tentu bukan tugas yang mudah, setelah beberapa dekade dikorbankan kecuali untuk beras, dan setelah NKRI terjun bebas, masuk kelompok negara melarat kurang pangan, *The Low Income Food Deficit Countries* (LIFDCs) menurut FAO.<sup>13</sup>

Industrialisasi yang menganaktirikan agro-industri ini telah gagal total dan menjadi biang terjerumusnya bangsa ini dalam krisis sepuluh tahun ini.<sup>14</sup> Sementara itu, progres pertanian hanyalah produksi beras, yang menebar banyak patologi pedesaan, a.l.: (i) orientasi produksinya memiskinkan petani; (ii)

tiadanya insentif pengembangan komoditas non-beras; (iii) ketergantungan lahan terhadap bahan kimiawi; (iv) menyalahartikan ketahanan pangan; (v) stagnasi diversifikasi usaha tani; dan (vi) ketahanan pangan makin tergantung beras, menafikan keragaman lokal.<sup>15</sup>

Bukanlah apologi kalau beban historis ini diulas sehingga rakyat terpaksa harus memaklumi kegagalan, sementara pemerintah boleh berlamban diri. Bukan pula untuk menafikan masalah lain, di luar tiga kendala dimaksud. Hal ini semata diulasa guna memperkaya obyektifitas dalam memahami dan mengkritisi kinerja sektoral pedesaan-pertanian pasca Orba, dan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pada khususnya, sekaligus untuk membangun landasan kebijakan pertanian pedesaan dan perekonomian bangsa ke depan menghadapi tantangan global.

### Tantangan Global

*Climate change* yang ramai dirembug dalam Konferensi Para Pihak ke-13 (COP-13) di Bali dan dihadiri ribuan peserta berikut sejumlah kesepakatan yang dihasilkan, memiliki banyak makna bagi sistem pangan global, pertanian dan lingkungan. Pergeseran dan ketidak-

<sup>11</sup> Daed Joesoef, "Untuk Apa Reformasi?", *Kompas*, 27/12/2007.

<sup>12</sup> Yasraf Amir Piliang, "Hantu-Hantu Demokrasi", *Kompas*, 25/7/2007.

<sup>13</sup> D. Ismoyowati and M. Maksum, *Civil Society Case Study for Indonesia in Cross Sectoral Partnership in Enhancing Human Security*, (Jepang: JCIE Publication, 2002); Jung et. all, *Civil Society Response to Asian Crisis-Thailand, Indonesia and Korea*, (Korea: IEWS, Yonsei University, 2003).

<sup>14</sup> Jung et. all, *Civil Society Response to Asian Crisis-Thailand, Indonesia and Korea*, (Korea: IEWS, Yonsei University, 2003).

<sup>15</sup> K. R. Kuswanto and M. Maksum, *The Implication of the Asian Financial Crisis: the Case of the Food and Agriculture in Indonesia*. Regional Experts' Workshop on Food and Agriculture Policy. Bangkok, 17-19/8/1999.

pastian musim berakibat menguatnya tekanan pasar pangan, ditengarai naiknya harga pangan dunia. Inilah tekanan global pertama, yang jauh sebelum Konferensi, telah diperingatkan oleh banyak pihak bahwa pertanian akan menjadi sektor yang paling terpukul.<sup>16</sup>

Kedua, pergeseran manfaat komoditas pertanian menjadi sumber energi nabati, suka atau tidak suka, akan mengakibatkan tajamnya konflik pemanfaatan lahan yang mengancam produksi pangan bagi 230 juta jiwa lebih manusia Indonesia.<sup>17</sup> Bagi tokoh LIFDCs seperti Indonesia, global shock ini adalah persoalan pembangunan yang harus lebih serius dicermati. Krisis pangan negeri agraris sekarang ini adalah lampu merah yang bisa membenamkannya lebih jauh lagi dalam LIFDCs.

Perkembangan politik pertanian global tidak kalah kuatnya sebagai tekanan ketiga bagi Indonesia. Ketika wacana dunia yang didominasi wacana *the end of ideology*<sup>18</sup> peringatan Blank tentang kiamat-

nya pertanian,<sup>19</sup> dan apatisisme pertanian negara maju,<sup>20</sup> dimentahkan habis oleh *September bombing 2001* yang meluluhlantakkan *twin towers*, terbelalakah mata dunia maju akan kerentanan bangsanya terhadap sabotase dan teror. Kesadaran yang berubah menjadi kewaspadaan terhadap terorisme, dan kemudian memilih proteksi pangan sebagai urusan ketahanan nasional, cukup menggetarkan negara berkembang yang agraris.

Dicontohkan oleh Brown,<sup>21</sup> bahwa Amerika langsung membentuk *Department of Homeland Security* (DHS), 2 Juni 2002, sebagai proteksi. Bush yakin kalau pertanian dan pangan amat rentan *bio-terrorism* dan percaya bahwa *homeland security* dipengaruhi pertanian yang punya relasi kuat dengan kesehatan ekonomi dan *national security*.<sup>22</sup> Kalau Soekarno menyebut pertanian soal hidup atau mati, Bush melihat *agricultural and food security* sebagai pilar *national security*. Puncaknya, *Homeland Security Presidential Directive*

<sup>16</sup> T Harijono dan B. Isworo, "Perubahan Iklim: Sektor Pertanian Paling Terpukul", *Kompas*, 23/6/2007.

<sup>17</sup> E. Fujita, "Saat Bahan Pangan untuk Energi", *Kompas*, Selasa, 27/11/2007.

<sup>18</sup> Daniel Bell, "The End of Ideology. From the Conclusion," lihat <http://www.writing.upenn.edu/~afilreis/50s/bell-chap13.html>; Lihat juga Francis Fukuyama, "The End of History?" *The National Interest*, Summer Edition, 1989; Bandingkan juga F. Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, (Amerika: Penguin Publication, 1992).

<sup>19</sup> S. C. Blank, *The End of Agriculture in the American Portfolio*, (Westport, Connecticut: Quorum Books, 1998).

<sup>20</sup> J. Ikerd, *21<sup>st</sup> Century Agriculture: The End of American Farm or New American Farm?* Presented at Partnership for Sustaining Agriculture, Woodland. 27-28/3/2001.

<sup>21</sup> L.R. Brown, *Food: A National Security Issue- Planet Under Stress*, (W.W. Norton & Co., NY, 2003)

<sup>22</sup> I. Dreyfuss, *Bush Orders Food Supply Protection*, (Washington: CBSNEWS, ©MMIV The Associated Press, 2004).

HSPD-9, yang perihalnya adalah *Defense of United States Food Purpose*, diundangkan oleh The White House (2004), 30 Januari 2004.

Pola nalar Blank<sup>23</sup> telah lebih lama menjangkiti teknokrat kita yang disetir para ekonomis dalam perencanaan negara. Mereka berpikir amat korporatis dan liberalistis. Fenomena ini menyesatkan kiblata bangsa, karena pertanian dilihat hanya sebagai fenomena ekonomis semata dan urusan pilihan, bukan urusan wajib. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka telah gagal memahami *what is in a grain of rice*, meminjam judul buku 80-an. Tentu, kata *rice* dipakai untuk menyebut pertanian dalam pengertian luas dan multidimensional.

Menguatnya proteksi negara maju membuat makin tidak adilnya perdagangan dunia. Ketidakadilan liberalisasi yang belum selesai, masih tetap merupakan ancaman global yang dihadapi negara berkembang. Kegagalan beberapa putaran persidangan WTO menunjukkan bagaimana negara berkembang anggota lembaga ini tidak bisa menerima proteksi negara maju yang makin berlebihan terhadap sektor pertaniannya. Keengganan negara maju untuk menurunkan proteksi ini adalah jalan buntu.

Empat persoalan tersebut adalah tekanan global dan eksternal terhadap pertanian Indonesia, terutama ketika berada dalam ketergantungan import yang tinggi. Tetapi sulit dipahami kalau para petinggi justru pesimis, menderita gagap kolektif, dan cenderung *meden-medeni* (menakut-nakuti, *ed.*). Tidak jelas, itu pesimisme atau rekayasa mereka yang terlanjur cinta impor pangan dengan janji upeti, meski kedaulatan pangan terga-daikan.<sup>24</sup> Pesimisme itu menyatu dengan sikap petinggi yang *tawadlu'*, *sami'na wa atho'na*, mengimani firman World Bank (WB) yang memang telah lama dipertuhankan, meski romantisme pangan murah menuntut konsekuensi pendlaliman rakyat tani.

Tekanan global yang bermuara pada empat hal tersebut memang merupakan ancaman ketika tidak disadari bahwa negara ini sebetulnya sudah lama 'bunuh diri' dengan memupuk ketergantungan pada impor (*import dependency*), sehingga setiap gangguan impor adalah ancaman. Berbeda kalau pola pikir diubah dari raja impor ke pola pikir agraris. Dalam posisi agraris, NKRI akan memandang tekanan dunia bukan lagi ancaman, tetapi tantangan, optimisme baru dan peluang,<sup>25</sup> seperti optimisme swasembada dan anti

<sup>23</sup> S.C. Blank, *The End of Agriculture in the American Portfolio*. (Quarum Books, Westport: Connecticut, 1998)

<sup>24</sup> Maksum, "Ekonomi-Politik Pertanian: Dalam Menunjang Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan," disampaikan dala Semiloka Kelembagaan Irigasi. JKI-Indonesia. Jakarta, 12/4/2007.

<sup>25</sup> Maksum, "Reformasi Struktural bagi Pengembangan Industri Pangan," disampaikan pada Seminar Pengembangan Industri Pangan Nasional. BEM FTP-UGM, 15/12/2007.

import presiden yang dilontarkan di Bandar Lampung dalam Peringatan Hari Pangan se-Dunia, 5 Desember 2007.

Importasi dan eksporasi memang hal wajar dan saling menguntungkan dalam perdagangan internasional. Begitulah dogma konvensionalnya. Akan tetapi, dalam dunia yang sarat politisasi, *global trading* tidak bisa dibatasi sekadar sebagai urusan finansial. Tidak cukup pula dibatasi nalar ekonomis. Tetapi harus lebih luas dan meliputi urusan ekonomi politik, *political ecology*, *welfare economics* dan *justice issues*.<sup>26</sup>

Komplikasi importasi ini ditunjukkan dengan jelas oleh *gonjang-ganjing* tahu-tempe awal 2008 akibat syahwat pejabat memupuk *import dependency* kedele, terlebih setelah Indonesia diamputasi IMF, 1998, serta terbius harga dunia yang murah dan kredit import dengan bunga nol persen, berikut segala rentenya, 1999-2002. Potensi produksi nasional yang 15 tahun lalu swasembada dengan produksi 1,8 juta ton tertutup birahi jangka pendek. Akibatnya, produktifitas nasional merosot tajam menjadi 620.000 ton pada tahun 2007 (Deptan, 2007), setelah sebelumnya 748.000 dan 808.000 ton pada tahun 2006 dan 2005. Betul sekali bahwa panasnya tahu-tempe ini adalah gejala global. Namun demikian, tergantungnya kinerja sistem ketahanan pangan telah

mengakibatkan gejala global tersebut terasa berlipat ganda. Konsistensi kebijakan sungguh amat dibutuhkan, bukannya ketidakpastian, dan keasyikan dendang ria: *esuk tempe sore dele* (pagi tempe, sore kedelai).

Gambaran importasi yang sering terbius oleh legitimasi ilusi finansial publik dan dibangun dengan membesar-besarkan isu *price discrepancy* antarnegara seperti dicontohkan dalam krisis tahu-tempe, sering pula memperoleh pembenaran akademisi *tukang*, walau berimplikasi marginalisasi sektoral fatal. Apa yang terjadi dalam industri pangan, khususnya perberasan nasional, memberikan ilustrasi lebih lengkap bagaimana ilusi dibangun guna menghasilkan keputusan yang dikotomis, merugikan rakyat tani, dan keberlanjutan sistem ketahanan pangan domestik.

### Dikotomi Ekonomis

Inflasi 8,7% untuk Oktober 2005, menyusul kenaikan harga BBM, sangat mengejutkan para petinggi yang takut inflasi tahunan dua digit. Dalam gagap kolektif, pengendalian kuat harga beras dan gula dinyanyikan sebagai solusi. Dalihnya, daya beli publik terbatas. Importasi beras semakin bertubi-tubi meski selalu dalam kontroversi. Amanat pengendalian inflasi Presiden waktu melan-

<sup>26</sup> P. Robbins, *Political Ecology*, (Victoria, Australia: Blackwell Publishing, 2004); lihat juga Maksum, 'Reformasi Struktural bagi Pengembangan Industri Pangan' disampaikan pada Seminar "Pengembangan Industri Pangan Nasional". BEM FTP-UGM, 15/12/2007.



i170.photobucket.com

tik hasil *reshuffle* kabinet, Desember 2005, dianggap restu terhadap *modus operandi* yang telah diputuskan para menteri.

Naasnya rakyat tani dalam inflasi, harga beras tidak boleh naik meski dia hanyalah komponen dan *transmitter*, bukan penyebab inflasi, yang memang dipicu BBM. Pada saat yang sama, petani juga pelengkap penderita dalam pengurangan subsidi BBM yang didukung LPEM-UI dan 26 tokoh nasional. Dukungan berbasis ramalan akan turunnya angka kemiskinan menjadi 13,87% karena kompensasi BBM ini sangat disesalkan Mubyarto dalam tulisan terakhirnya.<sup>27</sup> Ternyata, kemiskinan menjadi 17,75% setahun kemudian, Februari 2006,<sup>28</sup> menjelang haul pertama Almarhum Pak Muby.

Penghujung 2006 kembali diwarnai *firman* WB akan perlu dimurahkannya beras. Menurut lembaga pelepas uang ini, kenaikan harga beras telah menyebabkan tambahan tiga juta lebih orang miskin dan naiknya angka kemiskinan dari 15,97%, Maret 2005, menjadi 17,75%, Februari 2006. Amanat akhir tahun itu pun ditunjang dramatisasi WB tentang angka kemiskinan 49% kalau dipakai garis kemiskinan US\$

2,-, dan masih dibumbui *firman* akademik WB awal 2007 bahwa HET beras sebesar Rp 4.000,-per kilogram, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang tak perlu diubah, sesuai Inpres 13/2005.<sup>29</sup>

Sekilas, fakta di atas telah menggambarkan siapa penentu kebijakan pangan nasional sekaligus *ashbabul mushibah* (korban), biang kemandegan sektor pangan karena ilustrasi itu menunjukkan adanya dua beban sektor pertanian: sebagai produsen pangan murah dan pengendali inflasi, meskipun hakikatnya persoalan harga dan kecenderungan inflasinya perekonomian yang dipicu oleh kenaikan harga BBM. Sementara itu, pada sisi permintaan, rendahnya daya beli sebagai kambing hitam, sebenarnya terjadi akibat gagalnya membuka lapangan kerja

<sup>27</sup> Mubyarto, 'Indonesia dalam Perang Modern' dalam *Kompas*, 25/5/2005.

<sup>28</sup> Anonim, *Issues in Indonesian Rice Policy*, 2007. Draft.

<sup>29</sup> Anonim, *Issues in Indonesian Rice Policy*, 2007. Draft.

sehingga pertanian menjadi bempes tenaga kerja. Bempes ketenagakerjaan ini adalah beban ketiga.

Sofistikasi romantisme beras murah berdalih bahwa rakyat tani adalah *net consumers*.<sup>30</sup> Dalih yang selama ini dibesarkan WB ternyata dibantah Arifin (2007). Inpres 3/2007 yang harapannya memperbaiki nasib rakyat tani juga tidak jelas karena 'amanat' bahwa beras harus lebih murah dari gabah, satu kondisi yang tidak pernah terjadi sejak Mahapatih Gadjah Mada masih *sugeng*. Melengkapi romantisme, kembalinya paket monopoli impor beras September 2007,<sup>31</sup> plus kado tahun baru penurunan tarif impor beras 18,2% menurut PMK: 180/PMK.0111/2007,<sup>32</sup> telah menambah deretan kepijalan struktural rakyat tani produsen beras.

Akibat romantisme, petani yang sudah miskin harus ikhlas untuk lebih miskin lagi, menerima harga murah supaya tetangga yang daya belinya terbatas bisa

makan (termasuk dosen, guru besar, tentara, dll.). Padahal, menurut pemetaan KIKIS<sup>33</sup> di tujuh *vocal points*, termasuk *vocal point* petani sawah oleh PSPK-UGM dan PERCIK,<sup>34</sup> lemahnya daya beli ini bersifat struktural. Adalah tanda tanya besar, mengapa lemahnya daya beli karena kemiskinan struktural tidak diatasi dengan pragmatisme fiskal dan *special policy*, tetapi melalui *common policy* dengan memurahkan beras yang *accessible* bagi siapa saja. Bahaya sekali dogma WB yang tidak berbasis perbaikan daya beli dalam mengatasi kemiskinan, tetapi dengan memurah-murahkan pangan dan melanggar prinsip *indivisibility of human right*-nya UNDP.<sup>35</sup>

Pembenaran lain importasi adalah rendahnya produktifitas, dan efisiensi domestik, serta murahnya impor. Semua ini tentu harus komprehensif komparasinya karena terkait beragam hal, mulai tingkat mikro, sampai supra makro: *cap-*

<sup>30</sup> Anonim, *Issues in Indonesian Rice Policy*, 2007. Draft.

<sup>31</sup> Maksam, 'Reformasi Struktural bagi Pengembangan Industri Pangan' disampaikan pada Seminar Pengembangan Industri Pangan Nasional. BEM FTP-UGM, 15/12/2007.

<sup>32</sup> 'Bea Masuk Impor Beras Diturunkan' dalam *Kompas*, 29/12/2007.

<sup>33</sup> KIKIS, *Agenda Keadilan dan Pemberdayaan Rakyat: Dialog Nasional tentang Kemiskinan Struktural*. Laporan KIKIS, bekerjasama dengan AusAID, 2000.

<sup>34</sup> M. Maksam dan S.S. Arif, 'Sectoral & Structural Poverty Syndrome in Irrigation' dalam I. Hussain dan Eric B (eds). *Irrigation against Rural Poverty*, (IWMI Publication, 2001); M. Maksam dan S.S. Arif, 'Paradigmatic Change in the Indonesian Irrigation Development' dalam I. Hussain dan Eric B (eds), *Managing Water for the Poor*, (IWMI Publication, 2002); lihat juga Maksam, "Paradigmatic Change in the Indonesian Irrigation Development Policy Reform in Disarray" *WWC International Conference on Water and Politics*. Marseilles, 26-27/2004.

<sup>35</sup> UNDP, *Programming for Justice: Access for All*, (Bangkok: A Publication of UNDP Regional Office, 2005).

*tal cost, export subsidy, trade policy, monetary dan fiscal policies*, internal dan eksternal.<sup>36</sup> Andai saja rupiah tidak diproteksi dengan Rp 18 Triliun, 2005 dan Rp 20 Triliunan, 2006,<sup>37</sup> yang tiga kali dana Deptan, rupiah akan membalik kita jadi eksportir. Kajian komprehensif, internal dan external antarnegara belum pernah dilakukan kecuali komparasi sulapan.

Itulah yang terjadi pada subsektor pangan. Melalui tinjauan empiris disimpulkan bahwa semrawutnya subsektor pangan cukup mewakili sektor pertanian secara keseluruhan, termasuk peternakan, perikanan, kehutanan, dan keagrariaan.<sup>38</sup> Dampak proteksi rupiah misalnya, berakibat semakin mahal biaya produksi dan melemahnya daya saing sektor pertanian yang memang sarat dengan *domestic contents*.

Penghapusan BUSEP, kewajiban pabrik menampung susu lokal, telah merugikan peternak sapi perah.<sup>39</sup> Impor daging sapi *gendheng*, telur busuk dan paha ayam, juga membunuh peternak. Perikanan-kelautan yang telah lama dianaktirikan, belum punya kemajuan berarti. Proteksi nelayan yang tak jelas, *Over-fish-*

*ing, illegal fishing*, maraknya *trawlers* asing, dan kedaulatan pulau kecil yang rawan okupasi asing adalah raport perikanan. Sementara, saktinya *cukong illegal logging*, konservasi yang tidak mensejahterakan petani, degradasi daerah tangkapan air, dan makin haramnya kerajinan kayu *spanyolan*, adalah sebagian kecil dari prestasi kehutanan.

Sederet kepiluan itu masih ditambah *agricultural injustice* hasil pemetaan PSPK-UGM dalam kajian *Access to Justice (A2J)* dengan dominasi kasus konflik pemilikan lahan di luar Jawa yang terjadi: (i) antar individu rakyat tani; (ii) antar komunitas petani; (iii) antara petani dengan pemilik modal; dan (iv) antara petani, individu atau kelompok, dengan negara yang kinerja agrariannya masih jauh dari harapan UUPA.<sup>40</sup>

Dari beberapa ilustrasi, bisa disimpulkan bahwa semua itu terjadi karena kebijakan pembangunan teramat dikotomis, menempatkan pertanian yang potensial bagi agro-industrialisasi, dianaktirikan sebagai *sesaji* pemanjaan sektor industri non-agro, dengan fungsionalisasi pertanian sebagai: (i) pengendali inflasi, (ii) penyedia bahan baku murah, (iii)

<sup>36</sup> Maksun, 'Reformasi Struktural bagi Pengembangan Industri Pangan' disampaikan pada Seminar *Pengembangan Industri Pangan Nasional*. BEM FTP-UGM, 15/12/2007.

<sup>37</sup> Biaya Stabilitas Moneter Diperkirakan Rp 20 Triliun', *Kompas*, 21/7/2006.

<sup>38</sup> M. Maksun, 'Meluruskan Kiblat Pembangunan Pertanian Melalui Revitalisasi Peran Ideologis Ilmu Pengetahuan' disampaikan dalam *Sarasehan & Simposium: Pancasila*. UGM, 14-15/8/2006.

<sup>39</sup> M. Maksun, 'Strategi Pengembangan Peternakan: Menuju Keberdayaan Sektoral', Makalah Tunggal Seminar: *Hari Peternakan & Keswan*. Deptan. Jakarta, 27/9/2004.

<sup>40</sup> PSPK dan UNDP, *Strengthening Access to Justice and the Rule of Law*, Report presented in five research provinces. Jan-March, 2006.

produsen pangan murah; (iv) tumbang ketahanan pangan; dan (v) bempert ketenagakerjaan.

Kebijakan pembangunan yang meletakkan sektor pertanian sebagai prioritas dan *leading sector* dalam dokumen legal saja, seperti Repelita, GBHN-GBHN, Propenas, sampai RPPK, sudah barang tentu merupakan *structural injustice* yang tidak bisa dipahami. Karenanya, cermat sekali bagi pimpinan nasional yang memang dimulai dari desa dengan janji-janji kepada rakyat tani, jikalau KkD, membangun konsistensi janji kampanye dengan realisasi. Itu kalau tidak ingin terjadi pengorbanan rakyat dan pencemaran kepemimpinan nasional oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab sehingga memenuhi sindiran Suswono bahwa revitalisasi tidak pernah maksimal dan sekedar retorika.<sup>41</sup>

### Kembali ke Desa

Dikorbankannya sektor pertanian-pedesaan-tradisional *vis-a-vis* sektor industri-perkotaan-moderen akhirnya menempatkan industri non-pertanian paling diuntungkan karena pangan dan

tenaga kerja murah. Akibatnya, profitabilitas artifisial bisa dibangun semena-mena<sup>42</sup> dengan rakyat tani sebagai *the most disadvantaged people*.<sup>43</sup> Masih memadai kalau *protected business* ini berubah dari *infant industry* jadi dewasa dan berdayasaing ketika *disapih*. Nyatanya tidak. Setelah proteksi, kedirgantaraan malah mundur banyak langkah, telekomunikasi diarah Temasek dan Indonesia menjadi *users only*, pertambangan dan energi makin asyik *lego* konsesi, dan industri elektronika, menurut Masykur Wiratmo,<sup>44</sup> didominasi kemajuan teknologi adopsi, rakitan dan bajakan.

Melihat kegagalan industri pada satu sisi, dan potensi pertanian pada sisi lain, maka industrialisasi sudah seharusnya menuju agro-industri. Potensi ini tumbuh hebat: 1,3% dari 6,5% pertumbuhan kuartal ketiga,<sup>45</sup> sumbangan tertinggi sepanjang sejarah meski dihempas eskalasi BBM dan terkekang beragam kendala struktural. Hal ini mestinya membuat para pemimpin tersadar untuk melakukan *taubatan nashuha* setelah menganak-tirikan pertanian, dan kemudian menebus dengan membangun kesepakatan baru

<sup>41</sup> Suswono, *Bangkitlah Petani-Nelayan. Catatan Dakwah Dua Tahun di Parlemen*, (Jakarta: Bening Publisher, 2007)

<sup>42</sup> Maksum, 'Reformasi Struktural bagi Pengembangan Industri Pangan' disampaikan pada Seminar *Pengembangan Industri Pangan Nasional*. BEM FTP-UGM, 15/12/2007.

<sup>43</sup> PSPK dan UNDP, *Strengthening Access to Justice and the Rule of Law*, Report presented in five research provinces. Jan-March, 2006.

<sup>44</sup> Maskur Wiratmo, *Alih Teknologi dalam Proses Industrialisasi di Indonesia*. Disertasi Doktor UGM, 2002, tidak diterbitkan.

<sup>45</sup> Pengentasan Harus Memberdayakan, *Kompas*, 19/12/2007.

untuk KkD, pro-pertanian dan rakyat tani, meyakini kodrat agraris sebagai berkah *Ilahiyah*.

Pertanian telah menyelamatkan bangsa dengan mendukung pertumbuhan 2007 yang diperkirakan 6,3%, dan ditopang oleh kemantapan produksi pangan domestik. Tercapainya produksi padi 2007 sebesar 57 juta ton gabah kering giling dengan pertumbuhan 4,76%<sup>46</sup> adalah indikasi bahwa swasembada dan anti importasi yang dicanangkan Presiden awal Desember 2007, bukanlah mimpi siang bolong, walaupun menuntut konsekuensi: pupusnya rente importasi bagi oknum petinggi.

Dalam *climate change* ternyata masih ada berkah Ilahi peningkatan produksi, meski pusat pertumbuhan tidak lagi di kawasan langganan di Jawa yang hanya tumbuh 2,24%, dan diwarnai aneka kepalsuan, benih bajakan, pupuk subsidi yang menghilang, serta segala kelambatan. Pertumbuhan terjadi di luar Jawa dengan laju 7,8%.<sup>47</sup> Data ini memancing dugaan bahwa kreatifitas lokal memanfaatkan musim kemarau yang basah adalah penyelamat sistem pangan nasional kali ini.

Gairah pertanian juga muncul karena dukungannya terhadap industri pengo-



lahan yang ekspornya bernilai US\$ 4.4 Milyar, 2005 dan US\$ 5.4 Milyar, 2006.<sup>48</sup> Kontribusi industri pengolahan non-migas sebesar 27,6% terhadap PDB-2006, 7,16% milik industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau. Kontribusi paling signifikan PDB-2006 dari sektor pengolahan non migas didominasi cabang industri makanan, minuman dan tembakau (27,9%), barang kayu dan hasil hutan lain (5,8%), dan kertas dan barang cetakan (5,2%). Pertumbuhan subsektor ini pun naik tajam dari 2,75% tahun 2005 menjadi 7,22%, tahun 2006.

Optimisme pangan, kontribusi PDB pertanian dan naiknya eksportasi justru hebat dalam kondisi iklim tidak ramah dan eskalasi harga BBM. Berdasarkan fakta ini, pesimisme para *introverts* dalam melihat tekanan global, yang melenceng

<sup>46</sup> *Produksi Padi dan Palajija: ARAM-III tahun 2007*. (Jakarta: Deptan Jakarta, November 2007).

<sup>47</sup> *Produksi Padi dan Palajija: ARAM-III tahun 2007*. (Jakarta: Deptan Jakarta, November 2007).

<sup>48</sup> Fahmi Idris, 'Peningkatan Sektor Industri Pangan sebagai Salah Satu Agenda Utama Departemen Perindustrian', disampaikan pada *Seminar Industri Pangan BEM-FTP-UGM*, 15/12/2007.

dari tekad Presiden, mustinya dipermak. Terlebih, mengingat selama ini agroindustri tidak mendapat dukungan struktural.<sup>49</sup> *Structural adjustment* karenanya, memperoleh legitimasi untuk dibangun dan membalik kiblat pembangunan yang anti-petani menjadi KkD, pro-petani, mendasari optimisme menatap tekanan sebagai tantangan.<sup>50</sup> Kompetisi global tentu menuntut pendekatan industrial dalam memuluskan jalan KkD.

### Industri Pertanian sebagai Landasan

Ketika kata industri terdengar, asosiasi publik tertuju pada pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi dan setengah jadi, serta terkait dengan sofistikasi rekayasa dan teknologi seperti pabrik pesawat terbang, TIK, dsb., yang disebut *salah kaprah* sebagai industri. Akibatnya, industrialisasi dan *industrial society* menjadi terkait dengan pabrik, seutas dasi, teknisi dan para kuli.

Kedirgantaraan pernah menjadi prioritas, disertai proteksi *pol-pol* untuk industri otomotif dan elektronika. Semua berbasis import, padat modal dan teknologi. Konsekuensinya, industri pertanian nasional yang potensial,<sup>51</sup> diposisikan sebagai pelayan. Industrialisasi pertanian tidak pernah dilakukan serius kecuali

makin tak punya masa depan, terutama bagi anak muda dan direspon industri pendidikan yang ditandai oleh kian jижiknya ABG (Anak Baru Gede) terhadap ilmu pertanian, pangan, dan pedesaan.

Kata industri dalam dua paragraf terakhir memiliki jarak makna amat lebar. Pada paragraf terdahulu, dipahami *salah kaprah*, berasosiasi fabrikasi dan pengolahan bahan. Sementara, paragraf yang kemudian, tidak harus menyiratkan aktifitas pabrik. Industri dalam hal ini meliputi pengertian serba cakup seluruh aktifitas sistem industri, yang memiliki karakter sosio-kultural sesuai dengan *word history*-nya.<sup>52</sup>

Mengingat watak sosio-kultural tersebut, maka pengertian *industrial society* tidak harus disunat menjadi sekedar pekerja pabrik, permesinan dan berdasi. Dia bisa terkait dengan urusan sektoral yang sangat primer sekalipun, seperti konservasi dan pertanian-pedesaan, selama berorientasi *systematic work to some purposes*. Sayangnya, kata ini terkontaminasi kata informatika dan sebagainya, sehingga melupakan pertanian-pedesaan, kearifan dan sains rakyat tani. Adalah dosa besar dogma absolut ekonomi pembangunan yang melihat pertanian indikasi kemunduran negara. Dalam kaitan

<sup>49</sup> H.E. Prabowo dan Hamzirwan, 'Sektor Agroindustri: Potensi Besar, Dukungan Kurang', *Kompas*, 15/5/2007.

<sup>50</sup> M. Maksun, 'Pengembangan Kawasan: Revitalisasi Politik Ekologi dan Politik Ekonomi' disampaikan pada Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan. PSPK-UGM & PSLH-UMY. Garuda Hotel, Yogya, 5-7/9/2007.

<sup>51</sup> Fahmi Idris, 'Peningkatan Sektor Industri Pangan sebagai Salah Satu Agenda Utama Departemen Perindustrian', disampaikan pada *Seminar Industri Pangan* BEM-FTP-UGM, 15/12/2007

<sup>52</sup> Anonim, *Wikipedia, the free encyclopedia*. 2007

sosiologis, Gumilar mengingatkan bahwa masyarakat industri ditandai oleh suburnya komunitas dengan sensibilitas, nilai, semangat, dan etos kewirausahaan sehingga adaptif dan kreatif merespon dinamika dan logika ekonomi pasar.<sup>53</sup>

Mencermati nalar Gumilar, mestinya nasionalisme kita terusik melihat ekspor-tasi yang didominasi *glondhongan* kayu, *peresan* sawit, *klathak* kakao, tuna segar, getah karet, biji kopi, *mentahan* mete, bijih perak, dan segala *mentahan*. Sementara, importasi diwarnai bau *sengak* starbuck, von houten, bridgestones, dan krisis bahan baku Kota Gede yang membunuh pengrajin dan ribuan buruh. Krisis industrial sungguh sedang terjadi, bukan karena faktor teknologis, tetapi karena pola pikir dan kebijakan negara yang tidak industrial sehingga melepas larinya peluang nilai tambah dan *masalah* lebih luas yang harusnya bisa dikais melalui industrialisasi pedesaan sampai *global trading*-nya.

### Industrialisasi Pedesaan Sebagai Strategi

KkD dan industrialisasi pedesaan dengan demikian memang persoalan transformasi sosio-kultural.<sup>54</sup> Oleh karenanya, perjalanan KkD memerlukan *pre-conditioning* berupa segala stimulasi, reformasi insentif dan kebijakan untuk tidak lagi menganaktirikan pertanian-

pedesaan, mulai yang paling mikro melalui *access reform* secara konsisten, sampai kebijakan fiskal dan moneter yang berkeadilan bagi keseluruhan sektor ekonomi.

Sebagai contoh, proteksi rupiah berlebihan yang selama ini dilakukan demi kelayakan *import-based industry*, sudah waktunya dihentikan karena menyebar kesengsaraan melalui pemahalan biaya faktor produksi domestik dan penyebab disebutnya pertanian tidak efisien, sehingga solusinya adalah impor-tasi dengan segala implikasi. Banyak lagi kebijakan harus ditinjau ulang karena telah mencederai sektor pertanian yang sebetulnya hanya menuntut *fair play* dan dipasangkan sejajar dengan industri lain, tidak justru semakin dikorbankan dalam dikotomi ekonomis.

*Global shock* yang dihadapi oleh bangsa dengan beragam beban historis tentu memerlukan antisipasi cermat sebuah *good governance* yang tidak hanya transparan, akuntable, partisipatif, dsb., tetapi juga harus adil, terutama bagi sang papa, *the most disadvantaged people*.<sup>55</sup> *Sectoral injustice* sudah waktunya diparkir karena sudah tidak *njamani* dan lebih banyak menyebarkan mudarat daripada kemaslahatan umat.

Sebagai persoalan sosio-kultural, perjalanan KkD senantiasa berbasis

<sup>53</sup> 'Pengentasan Harus Memberdayakan', *Kompas*, 19/12/2007.

<sup>54</sup> M. Maksam, et. all, *Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Pedesaan Menuju Masyarakat Agroindustri*. Laporan ARM Project-II, No.: PL.420.808.1159/P2KP3, 1999.

<sup>55</sup> Amartya Sen, *The Search for Ways and Means to guarantee Security for Every Human*, Workshop on Human Security. UNC-HS. 25-26/2/2003; UNDP. 2005. *Programming for Justice: Access for All*. A Publication of UNDP Regional Office, Bangkok.

kesetimbangan sistem sosio-kultural lokal yang dibatasi kinerja subsistem pendukungnya, yaitu subsistem tata-nilai, sosial-ekonomi, *artifact* dan subsistem bukan manusia, dalam rekonstruksi nilai-nilai sosial industrial.<sup>56</sup> Menurut pemahaman ini, sofistikasi rekayasa dan teknologi merupakan unsur amat penting, sebagai indikasi internal sistem sosiokultural maupun stimulan industrialisasi. Akan tetapi, sofistikasi adalah *tool* perubahan dan bukan yang terpenting seperti disalahpahami selama ini sebagai penentu dan indikasi tunggal, bahkan sampai penyeteraan bahwa industrialisasi adalah TIK dan kedirgantaraan.

Keterpaduan terapi ekonomi politik dan politik ekologi dalam pengembangan industri bisa cermat dibangun untuk KkD melalui *super-imposing* beragam kaidah dalam pengembangan kawasan.<sup>57</sup> Pada tingkat pertama, keterpaduan bisa dibangun dalam triangulasi sinergi antara: (i) pilihan intervensi strategis, politis-ekonomis-sosial-teknologis-ekologis; (ii) keseimbangan sistem sosio-kultural yang meliputi subsistem: tata nilai-sosial-*artifact-nonhuman*; dan (iii) tujuan pembangunan kawasan pedesaan: *growth-equity-sustainability*.<sup>58</sup>

Pilihan strategis untuk KkD dengan demikian akan memiliki kesesuaian lokal dan tidak menimbulkan lompatan budaya (*cultural jumps*), sekaligus bisa mempersembahkan ketercapaian tujuan pembangunan: pertumbuhan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam konteks inilah telaah partisipatif seksama untuk bisa memetakan watak sistem sosiokultural yang sangat lokalistik dengan kepakaran dan kearifannya semakin memiliki relevansi.

Pada tingkat kedua, berbasis pada keterbukaan jalan KkD, dalam pengertian komunitas, sektoral maupun teknologis, maka KkD sangatlah terbuka bagi investasi eksternal yang meliputi upaya *on-farm*, *off-farm* dan *non-farm*, sepanjang endogenisasinya memenuhi triangulasi kedua, yaitu sinergi antara: (i) triangulasi pertama: intervensi strategis, sistem sosio-kultural, dan tujuan pembangunan; (ii) jaminan *business security triangle*, berintikan: *sustainable profit*, *social progress* dan *environmental protection*; dan (iii) harmoni relasi natural: *profit-people-planet*. Dua hal terakhir, diadopsi dari Parker,<sup>59</sup> merupakan kisi-kisi *business ethics* berkenaan dengan investasi di pedesaan yang *justiciable*.

Peringatan metodologis ini perlu

<sup>56</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 2000).

<sup>57</sup> M. Maksum, 'Pengembangan Kawasan: Revitalisasi Politik Ekologi dan Politik Ekonomi' disampaikan pada Seminar Nasional: *Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan*. PSPK-UGM & PSLH-UMY. Garuda Hotel, Yogyakarta, 5-7/9/2007.

<sup>58</sup> M. Maksum, 'On the Critical Triangle of Agricultural Development' dalam M. Maksum, *et.all* (eds), *Sustainable Agricultural Development for a Global World Tomorrow*, (Yogyakarta: PSPK-UGM Publication, 1997).

<sup>59</sup> D. Parker, *Corporate Responsibility*. Conoco Inc.

dilontarkan karena perjalanan bangsa sudah kian parsial dan makin menjauhi kiblat, melupakan aspek sosiokultural dan mutu lingkungan. Dalam *structural adjustment*, *access reform* dan penghapusan dikotomi ekonomis adalah prasyarat utama bagi industrialisasi pedesaan, baik internal memenuhi triangulasi pertama maupun investasi eksternal menurut triangulasi kedua. Melalui pendekatan tersebut, nilai tambah, daya beli publik, kinerja penanggulangan kemiskinan, keberlanjutan pembangunan pertanian dan bangsa bisa ditingkatkan lebih memadai. Pada gilirannya, kesenjangan desa-kota, antarkelas, antarsektor, dan antar-daerah bisa ditekan, tidak justru membiarkan pedesaan dan daerah-daerah yang sudah tertinggal, makin tertinggal dan ditinggalkan oleh pembangunan.

Kisi-kisi dua triangulasi besar industrialisasi pedesaan itu mengamankan kaidah mutakhir pengembangan kawasan yang semakin multidimensi sebagai realitas

tantangan bersama yang dihadapi oleh Jurusan Teknologi Industri Pertanian (JTIP-FTP), Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, dan Fakultas Teknologi Pertanian pada khususnya, serta seluruh kekuatan akademik UGM pada umumnya, ketika masih meyakini dirinya sebagai universitas *ndesa* dan motor penggerak pembangunan pedesaan.

Akhirnya, mari buka mata, betapa *pas-pasan* daya tawar politis sektor pertanian sehingga segalanya ditentukan pihak lain, yang belum pernah melihat pohon nasi dan pohon tempe, yang bisanya hanya menempatkan pertanian sebagai pelayan dan kewenangan pilihan. Sudah waktunya aktifis pertanian tampil ke tengah, menyongsong *tembang nelangsaning kawula alit* (nyanyian kesengsaraan rakyat kecil, *red.*) untuk dijabarkan dengan gamblang dan dirumuskan, menjadi penentu keputusan dan arah perekonomian yang agro-industrial, sekaligus melandasi rekonstruksi perekonomian

nasional. Sekali lagi, sudah bukan waktunya menghibur rakyat dengan pemanjaan legal belaka seperti GBHN, Repelita, Proenas dan Pro-peda, yang tanpa gigi dan realisasi, termasuk pula janji RPPK, jikalau revitalisasi pertanian tidak segera terealisasi. *Na'udzubillah.* ❖



theanthorium.files.wordpress.com